

#9

Dari Km 0 (Nol), Ujung Barat Indonesia: Mencari Makna di Balik Data

Eko Wahyono & Badrun Susantyo

A. Sebuah Pengantar: Regsosek di Aceh Besar

Data yang akurat, komprehensif, dan mutakhir mutlak harus dimiliki sebagai dasar pembangunan nasional. Tanpa ada data yang akurat, arah pembangunan akan kabur dan tidak tepat sasaran. Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai agenda pembangunan nasional memiliki kebutuhan data yang akurat dan holistik. Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) merupakan sebuah ikhtiar untuk menyatukan data yang terserak diantara kementerian/lembaga yang menjadi *stakeholder* kunci pembangunan nasional. Instrumen penelitian, petugas pelaksana teknis, dan nonpetugas merupakan piranti penting yang menjamin ketersediaan dan keakuratan data (Feeney & Feeney 2019).

E. Wahyono & B. Susantyo
Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: ekow005@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional
Wahyono, E., & Susantyo, B. (2023). Dari km 0 (nol), ujung barat Indonesia: mencari makna di balik data. Dalam Humaedi, M. A., Imron, D. K. & Pramono, A. (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Seri 2: Indonesia Tengah-Barat* (305–346). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.777.c711 ISBN: 978-623-8052-95-0 E-ISBN: 978-623-8052-99-8

Kedatangan tim peneliti BRIN ke Aceh sebagai salah satu bagian dari kegiatan Regsosek dan bagian dari Satu Data Indonesia (SDI). Aceh sebagai sebuah provinsi memiliki karakteristik yang sangat unik, baik dari topografi, budaya, dan etnis masyarakat. Mendatangi Aceh dengan antusias yang tinggi, iming-iming kopi dengan cita rasa yang khas serta makanan yang kaya bumbu tak lepas dari imaji. Kami dari BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) bertugas sebagai tim supervisi proses kegiatan Regsosek 2022 di Provinsi Aceh khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Pahlawan nasional, Cut Nyak Dhien dilahirkan di Lampadang yang merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Besar ini. Seperti namanya, kabupaten ini sangat lah besar dan luas, tak kurang 2.969,00 km² total wilayah kabupaten ini terbentang dari ujung paling barat Indonesia. Jumlah populasi sebanyak 407.775 jiwa dengan kepadatan penduduk 137/km² (350/sq mi), dari 23 kecamatan dan 604 gampong. Dengan bentang alam yang luas dan beragam topografi dari kepulauan sampai pegunungan ini, tentu memberikan tantangan sendiri bagi petugas BPS untuk mencacah dan mencatat data dari semua penduduk.

Upaya terstruktur dan sistematis tentu sudah dimiliki oleh lembaga se-kaliber BPS untuk melaksanakan tugas ini. BPS Aceh Besar dengan sepenuh hati mengeluarkan tenaga dan pikirannya untuk menunaikan *hajatan nasional* tahun 2022. Sebanyak 13 kecamatan dengan jumlah 122.497 kepala keluarga (KK) harus tuntas dalam tempo 1 bulan, target yang tidak mudah. Untuk melaksanakan misi ini, tak kurang 29 Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka), 144 Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML) dan 539 Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dikerahkan untuk menuntaskan tugas sensus ini. Artinya, terdapat 712 anggota tim di lapangan yang setiap hari berjibaku mengumpulkan data dari pagi sampai malam.

Cerita suka duka dan harapan teman-teman di lapangan datang silih berganti, baik dalam bentuk diskusi maupun curhatan. Beberapa kondisi hambatan umum yang dialami adalah kondisi cuaca hujan, petugas kurang sehat, petugas kurang paham dengan konsep definisi,

dan tentu responden (masyarakat) yang sulit untuk dijumpai menjadi kendala utama pada sensus Regsosek tahun ini.

Di lapangan, tim peneliti BRIN sebenarnya lebih banyak menemani dan belajar dari kawan-kawan BPS serta menggali ilmu dari masyarakat. Proses pencacahan data, secara teknis membutuhkan pemahaman konsep, ketelitian, dan *cross check* yang berulang-ulang antara PPL, PML, dan Koseka. Namun, tantangan tidak hanya itu saja, kesabaran dalam menghadapi berbagai karakter masyarakat dan bentang alam yang tidak mudah untuk dilalui. Untuk mendapatkan data, seorang PPL bahkan harus mendatangi rumah sampai 4 kali (baru berhasil). Melintasi jalan terjal, perbukitan, melintasi lautan, sungai tanpa jembatan, dan hutan menjadi hal biasa bagi seorang pencatat data.

B. Aceh Besar diantara Bentang Alam Tersulit: Tanpa Menyerah!

Kabupaten Aceh Besar memiliki bentang alam yang sangat luas dan beragam. Terbentang dari wilayah kepulauan ujung barat Indonesia sampai dengan wilayah Pegunungan Seulawah di timur laut. Pada sisi barat wilayah Kabupaten Aceh langsung berbatasan dengan Samudra Hindia dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka pada wilayah timur. Kondisi kepulauan dan pegunungan ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi petugas pencacah dalam melaksanakan tugasnya.

Beberapa wilayah seperti Pulau Breueh dan Pulau Nasi harus dijangkau dengan kapal kayu selama kurang lebih 2 jam perjalanan dari Banda Aceh menuju Pulo Aceh. Keterbatasan infrastruktur jalan dan telekomunikasi juga ikut andil sebagai kendala dalam menjangkau data di lapangan. Pada saat di Desa Malingge, Kecamatan Pulo Aceh, tim PML kesulitan untuk menghubungi teman-teman PPL yang berada di lapangan (karena ketiadaan jaringan telekomunikasi), alhasil kami harus menyusuri satu persatu lorong rumah agar dapat berjumpa. Begitu juga pada saat di sepanjang pesisir Pantai Sanay,



Foto: Eko (2022)

Gambar 9.1 Bersama tim Regsosek Kab. Aceh Besar menuju Pulau Aceh (P. Breuh) menggunakan kapal motor (kapal kayu)

tim Regsosek juga cukup kesulitan dalam sinyal, dibutuhkan waktu sekitar 3 jam perjalanan dari ibu kota kabupaten (Gambar 9.1).

Perjalanan ke lembah Seulawah juga sarat akan perjuangan, puluhan kilometer jalan yang terjal dan berliku serta rimbunnya hutan dan kebun-kebun masyarakat, perlu dilalui untuk menuju lokasi ini. Sabang, kota paling utara juga menjadi magnet daya tarik dan perlu diketahui proses pencacahan Regsosek. Ekspedisi bentang alam kali ini akan kami buat dalam berbagai episode. Setiap episode memiliki makna yang berbeda dengan episode yang lainnya.

1. Episode Pulau Breueh

Bentang alam tersulit, salah satunya bisa ditemui di Gampong (desa) Malingge, Kecamatan Pulo Aceh, Pulau Breueh. Jika dihitung jarak dari ibu kota Kabupaten Aceh Besar (Kota Jantho), membutuhkan kurang lebih 6 jam perjalanan (4 jam darat dan 2 jam laut). Gampong Malingge di Pulau Breueh ini merupakan desa paling barat di Indonesia karena tidak ada lagi desa setelah wilayah ini.

Selasa siang, 1 November 2022 bertepatan dengan 7 Rabiul Akhir, tim peneliti BRIN diantar oleh tim Regsosek BPS Provinsi Aceh sampai

ke pelabuhan untuk menyebrang ke Pelabuhan Gugob Sueurampong, Pulau Breueh. Perjalanan ke Pulau Breueh kali ini, kami ditemani oleh Bapak Mustafa (Bidang Manajemen Lapangan Regsosek BPS Kabupaten Aceh Besar), belakangan ini kami memanggilnya Cek Mus, panggilan akrabnya di kantor. Pada awalnya saya bertekad sendirian meliput kegiatan teman-teman PPL di lapangan, tetapi Cek Mus datang menyusul ketika kami makan siang dan hendak naik kapal kayu.

Lalu-lalang penumpang terlihat sangat sibuk, beberapa sepeda motor dan juga beberapa ekor hewan ternak (kerbau) diangkut ke atas kapal kayu, bahan sembako, dan material bangunan juga semua dimasukkan ke dalam lambung kapal. Puluhan jerigen solar di tata rapi, solar ini digunakan untuk menghidupi listrik penduduk di Pulau Breueh. Sekitar pukul 14.00 mesin kapal sudah berderu, tanda kapal akan segera berlayar. Kami duduk di bagian belakang kapal, bersama rombongan guru sekolah dasar dari Malinggae.

Siang itu kondisi laut cukup baik dengan ombak yang tenang dan cuaca cerah. Sekitar pukul 17.00 WIB kapal kami tiba di Pelabuhan Gugob Sueurampong. Akhirnya, tiba di Pulau Breueh. Pulau yang konon hanya 30% penduduknya yang selamat dari gelombang tsunami. Sekitar 70% sisanya ikut hanyut terbawa arus gelombang air. Sebagian besar penduduk yang selamat dari terjangan tsunami adalah mereka yang mampu menyelamatkan diri menuju ke perbukitan tinggi di Pulau Breueh.

Tim PML sudah menunggu kami di warung kopi di samping pelabuhan. Setelah menghabiskan satu cangkir kopi, kami pun bergegas ke lokasi PPL bertugas. Untuk sampai ke Gampong Lempuyang, diperlukan waktu sekitar 20 menit menggunakan kendaraan motor roda dua dari pelabuhan dengan menyusuri bibir pantai dan perbukitan. Untuk sampai kerumah-rumah penduduk, beberapa jalan hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda dua, kendaraan kita parkir di pinggir jalan dan kita masuk ke lorong-lorong rumah penduduk. Dua PPL dan satu PML sedang mencacah warga di rumah kayu panggung. Ketiganya adalah perempuan, hebat dan tangguh

adalah kata yang disematkan untuk mereka bertiga. Selanjutnya, tim lapangan segera bergegas ke salah satu rumah penduduk, seorang nenek tua kita temui. Agak samar nenek tersebut menyatakan bahwa usianya sekitar 70 tahun. Beberapa percakapan kurang bisa dipahami karena penduduk yang berusia lanjut hanya bisa menggunakan bahasa asli, dan kurang fasih menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk *cross check* ulang percakapan antara PPL dengan penduduk.

Dengan sabar dan ketelatenan, petugas PPL menanyakan satu persatu pertanyaan di kuesioner. Ketika salah satu petugas PPL sedang melakukan pencacahan, petugas PPL lain dan PML ikut *cross check* dan membantu jika ada pertanyaan yang terlewat atau terjadi kesalahan dalam mengisi. Detail mengenai pertanyaan dan jawaban di telisik satu persatu, kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk menyelesaikan satu kuesioner.

Jika respondennya berusia lanjut dan tidak bisa membaca, tentu akan menjadi tantangan tersendiri dan sering kali membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menjawab. Responden harus menjawab satu persatu jawaban sambil mengingat ingat pertanyaan dan jawaban apa yang akan diberikan. Beberapa kali responden menanyakan ulang mengenai apa yang ditanyakan oleh petugas PPL. Dengan penuh sabar dan ramah, petugas PPL akan mengulangi pertanyaan kembali jika diperlukan. Jika perlu, dijelaskan dan *cross check* ulang kembali. Setelah selesai melakukan pencacahan, petugas PPL mengambil sejumlah foto rumah dengan menggunakan kamera ponsel untuk *tagging*. Saya melihat petugas PPL mengitari rumah sambil mengadahkan *handphone* ke langit, berharap dapat menangkap sinyal lebih kuat. Kami pun pamit dari rumah warga dan melanjutkan perjalanan untuk mencacah penduduk lainnya.

Satu tim rombongan yang terdiri dari PPL, PML, dan Koseka menyusuri lorong-lorong jalan rumah warga yang tidak bisa dilalui dengan menggunakan sepeda motor. Batas antara rumah warga satu dengan yang lain dipagari dengan tanaman gamal. Hampir di sepanjang pemukiman dan perkebunan warga ditanami jenis tanaman



Foto: Eko (2022)

Gambar 9.2 Perbincangan di kedai kopi adalah hal lazim di sebagian besar masyarakat Aceh sebagai media silaturahmi dan memperkuat akar kebersamaan.

ini sebagai tanda pembatas alami. Setiap kali masuk ke rumah warga terdapat semacam pintu gerbang yang terbuat dari kayu. Kami memasuki pemukiman rumah warga yang akan dicacah setelah berjalan kaki sekitar 100 meter. Sepasang kakek-nenek yang berusia lebih dari 70 tahunan sudah menunggu di rumahnya (Gambar 9.2).

Pencacahan dengan keluarga R (Inisial) di lakukan secara bersama-sama, pengisian dilakukan oleh PPL dengan didampingi oleh PML dan Koseka. Kali ini proses pencacahan berlangsung cukup lama karena pada satu waktu kami mencacah 3 anggota keluarga yang berusia lanjut. Adzan magrib yang menghentikan dialog antara petugas PPL dengan warga. Rencana awal, tim peneliti akan menginap di *guest house* milik gampong (desa), tetapi karena penuh diisi oleh PPL (yang berasal dari luar pulau) kemudian tim peneliti menginap di gedung serba guna Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Menyadari akan jauhnya jarak tempuh dari rumah, dan harus menyebrangi laut ke lokasi pencacahan para petugas PPL harus fokus di Pulau Breueh dan tidak pulang sampai tugas diselesaikan. I (Inisial) merupakan salah satu PML yang selama 3 hari setia menemani tim peneliti.

Malam itu I menceritakan bagaimana perjuangan teman-teman PPL di lapangan. Tak luput juga dia menceritakan bahwa bagaimana upaya yang dia lakukan untuk menyelamatkan diri dari gelombang tsunami di tahun 2004. Kami mengobrol sampai kira-kira pukul 23.00 WIB untuk merencanakan kegiatan esok hari di sekitaran Gampong Malingge. Saatnya pulang dan beristirahat.

Pagi selepas subuh, beberapa kerbau dibiarkan lepas mencari makan dengan sendirinya di sekitaran Pantai Lempuyang. Pagi itu aktivitas di pelabuhan kecil sudah ramai. Tampak beberapa nelayan sudah mondar-mandir mengendalikan perahu motor untuk melaut. Kopi saring robusta disajikan pada saat panas, aromanya tercium tercampur udara khas pantai. Sebelum menyeruput kopi saring ala Aceh ini, saya memesan sebungkus nasi lemak ikan. Dua meja panjang, tak kurang dari 10 orang penuh diisi oleh masyarakat lokal dan beberapa teman dari BPKS. Secara alami, seolah olah tim peneliti, BPS, dan warga sedang melakukan *focus group discussion* yang sudah direncanakan sebelumnya. Isu-isu krusial yang didiskusikan adalah mengenai potensi lokal, kehidupan nelayan, tsunami, sensus penduduk, harapan kepada negara dan juga keluh kesah keseharian masyarakat pinggiran. R (Inisial) menceritakan bahwa dahulu kelapa dijual dari Pulau Breueh ke Banda Aceh, akan tetapi pada saat ini justru kelapa dan minyaknya didatangkan dari daratan. Sumber daya yang seharusnya mampu dihasilkan sendiri tetapi justru didatangkan dari luar pulau. Tangkapan ikan juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada dua dekade sebelumnya ikan sangatlah mudah dijumpai di sekitar pantai. Akan tetapi saat ini, nelayan harus melaut sampai ke tengah untuk mendapatkan tangkapan ikan.

Sekitar pukul 09.00 WIB tim peneliti tiba di *basecamp* para PPL. *Basecamp* ini ditempati PPL untuk mengaktifkan waktu, beberapa PPL berasal dari Pulau Nasi. Artinya, PPL harus menyebrang pulau dan menyewa kapal untuk sampai pada lokasi pencacahan penduduk. Sebuah perjuangan yang tidak mudah, terlebih sebagian besar pencacah merupakan perempuan. Pagi itu tim peneliti mewawancarai PPL yang bernama M (Inisial) di depan *Guest House* Meurandeh (Gambar 9.3).



Foto: Eko (2022)

Gambar 9.3 *Guest house* Meurandeh, tempat menginap dan *basecamp* Tim Regsosek Kecamatan Pulau Aceh (P. Breuh).

M merupakan PPL yang berasal dari Pulau Seberang, yakni dari Pulau Nasi. Pagi ini M sembari menyiapkan berkas kuesioner untuk persiapan pencacahan di Malingge. Tim PPL membawa bekal nasi untuk di sanpap di perjalanan dan lokasi pencacahan. Perbekalan makanan perlu disiapkan, mengingat jarang ditemukan penjual makanan di Pulau Breueh. Setiap pagi PPL menyiapkan kuesioner yang disusun rapi dan dikelompokkan berdasarkan kuesioner yang kosong, yang sudah diisi dan yang sudah di verifikasi.

Tim peneliti menanyakan mengenai pengalaman M dalam mengambil data dan bagaimana saja proses dan tantangannya. “Ya biasa melintasi pulau untuk mencacah data, Pak. Ke sini, saya menggunakan kapal *boat* yang harus disewa. Di sini, saya tinggal di penginapan ini karena tidak mungkin bolak-balik dari rumah,” jawab M. M merupakan PPL yang terampil dan lincah, berlatar belakang pendidikan Kesehatan, tetapi tetap sigap dalam mengisi data data

sensus. Dalam melaksanakan tugasnya, M dan PPL lain terkadang sampai lupa makan siang. Pada saat asyik bercerita mengenai mekanisme kerja pencacah, tiba-tiba hujan turun membubarkan diskusi. Seketika berkas-berkas yang disusun di atas meja teras rumah tanpa atap ini harus kami selamatkan terlebih dahulu. Kami pun melanjutkan cerita dan keluh kesah mengenai proses pencacahan penduduk. Ternyata hujan turun tidak sampai 5 menit, mungkin hujan hanya lewat dan mengajak bercanda. “Sudah siap? Mari berangkat!” ucap seseorang dari luar rumah. Tim pun bersiap untuk melakukan pendataan lagi. Sebelum berangkat, seluruh anggota berfoto-foto bersama di depan *guest house* untuk mengabadikan momen pagi ini.

Kira-kira dibutuhkan perjalanan satu jam untuk sampai ke Gampong Malingge. Jalan menyusuri bibir pantai, dengan pemandangan perbukitan dan persawahan menjadi sajian utama dalam perjalanan kali ini. Jalan berliku, berkelok naik turun, dan beberapa titik terdapat jurang dan badan jalan yang longsor menjadi hal yang sepertinya biasa dilalui oleh petugas lapangan tim Regsosek. “Petugas lapangan BPS tak boleh cengeng, Pak!” kata-kata yang paling ku ingat pada saat perjalanan. Hal ini juga yang kemudian menguatkan dan membuat saya menjadi lebih bersemangat dalam menjalankan tugas. Totalitas! Setelah satu jam perjalanan dengan penuh perjuangan mengendalikan laju dan kendali motor, kami tiba di gampong. Kami langsung ke rumah warga. Sudah ada Pak I (inisial) di dalam rumah warga. Rumah panggung yang terbuat dari kayu ini terasa damai dan rapi. Kami menunggu dari luar, beberapa menit kemudian Pak I keluar dan menyapa kami. Saya mengenalkan diri dan kemudian saya langsung wawancara dengan Pak I. Saya meminta izin untuk membuat video wawancara dengan latar belakang perbukitan dan suasana khas ala pedesaan.

Dalam wawancara ini, dijelaskan bahwa jarak yang jauh dan juga kondisi hujan menjadi salah satu kendala. Sebagian besar warga berprofesi sebagai nelayan dan perlu waktu khusus untuk dapat menjumpai warga. Sore hari merupakan waktu yang paling mujarab dan efektif. Sinyal juga menjadi kendala dalam *men-tagging* data

penduduk. Ketika saya tanyakan apakah ada warga yang menolak untuk disensus, ternyata tidak banyak dan hampir tidak ada warga yang menolak untuk disensus. Pada dasarnya mereka terbuka dan tidak merasa terbebani dengan sensus penduduk. Beberapa warga justru menyiapkan jamuan atau memberikan oleh-oleh makanan ke petugas sensus. Peran sosialisasi dan *keuchik* (kepala desa) dalam mengabarkan sensus menjadi salah satu kunci, terlebih petugas sensus juga dilengkapi dengan data diri yang lengkap dan berasal dari daerah sekitar lokasi sensus. Sesuai wawancara dengan PPL kami duduk istirahat sebentar di sebuah teras rumah kosong milik penduduk.

Setelah cukup istirahat perjalanan dilanjutkan menuju gampong di ujung pulau, sebagian tim PPL sampai ke pantai untuk mencari sinyal. Beberapa PPL yang sudah di lapangan tidak bisa dihubungi karena tidak ada sinyal. Gampong Malingge, desa paling barat di Indonesia yang memiliki puluhan pantai indah nan asri. Beberapa turis internasional kami lihat berada di sekitaran pantai. Karena sinyal yang cukup susah, kami tetap mencari PPL dan menyisir perumahan warga. Ternyata PPL sudah selesai mencacah dan bersiap-siap ke lokasi yang lainnya. Tim kemudian singgah di Menara Williams Toren III. Para PPL mengajak singgah di sini untuk melihat pantai sembari makan siang bersama di atas menara. Perlu menaiki ratusan tangga untuk sampai pada puncak menara ini. Dinding setebal 1 meter masih terlihat kokoh, meskipun menara ini sudah berdiri sejak dua abad yang lalu. seluruh tim menyantap makan siang sambil melihat Pulau Weh (Sabang) dan luasnya lautan dari atas menara.

Setelah selesai menyantap makan siang, semua tim pun turun dari menara dan siap untuk melakukan pencacahan jiwa lagi. Petugas PPL yang setengahnya lebih perempuan, cukup lihai dalam mengendarai motor roda dua. Medan yang berat seperti jurang dan perbukitan dilewati untuk mendapatkan data yang akurat. Akan tetapi, mereka tidak pernah menyerah dan melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sebuah dedikasi yang luar biasa. Malam hari sekitar jam 20.00–23.00 WIB seluruh tim berkumpul bersama untuk membahas dan mengevaluasi kinerja kita hari ini di *Guest House* Meurandah Gampong Ulee Paya.

Pagi ini jam 07.00 WIB tim peneliti BRIN dan petugas BPS tiba di pelabuhan Lempuyang, menunggu kapal kayu menuju pelabuhan Banda Aceh. Pagi ini berbagai jenis binatang ikut masuk di atas kapal, tak kurang dari dua ekor kerbau, dua ekor sapi, dan dua ekor kambing ikut berlayar dari Pulau Breueh menuju Banda Aceh. Puluhan atau mungkin ratusan tabung gas kosong elpiji 3 kg masuk dengan cepat ke lambung kapal. Puluhan kilogram ikan juga siap di bawa ke Banda. Kapal kayu Pulau Breueh ke Banda Aceh hanya ada pemberangkatan satu kali sehari (jam 08.00 WIB) tanpa tiket dan tanpa asuransi keamanan. Namun, masyarakat seperti sudah biasa dan tanpa rasa khawatir menikmati perjalanan sambil sesekali menghisap rokok di atas kapal.

2. Episode Lhoong

Bentang alam dan tantangan sulit lainnya adalah Kecamatan Lhoong. Sebuah wilayah yang lokasinya berada diantara gunung dan laut. Keberangkatan dari Banda Aceh menuju Kecamatan Lhoong, selepas rapat dengan seluruh Koseka di Kota Aceh Besar. Perjalanan di mulai selepas salat zuhur dan makan siang. Perjalanan kali ini terasa spesial (Gambar 9.4) karena kami didampingi Bapak Irnanto (Kepala BPS Kabupaten Aceh Besar), Pak Mustafa (Manajemen Lapangan BPS Aceh Besar), dan Pak Badrun (BRIN).

Kurang lebih pukul 13.00 WIB perjalanan dimulai dari Energy Coffee, *base camp*nya para PPL, PML, dan Koseka BPS Aceh besar. Mengecek data sambil ngopi dan diskusi kurang lebih seperti itu aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Belum 1 kilometer perjalanan roda berjalan, kami sudah disambut hujan rintik-rintik. Mendung juga bergelayut di antara perbukitan yang sepanjang jalan di lewati. Di sepanjang jalan di diskusikan mengenai permasalahan kependudukan dan pencacahan yang dilakukan oleh BPS Aceh Besar. Kali ini menjadikan pak Irnanto sebagai narasumber selama di perjalanan. Pak Ir menggambarkan bahwa sepanjang jalan yang dilewati pernah habis diterpa ombak tsunami. Salah satu lokasi paling parah terkena

dampak gelombang air, tetapi kini kondisinya sudah jauh lebih baik dan bisa dikatakan kembali seperti semula. Beberapa masyarakat sangat sulit di deteksi keberadaannya karena berpindah pindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Jalan menuju Kecamatan Lhoong sangatlah lebar.

“Jalan ini sangat lebar dan bagus, dibangun oleh Amerika,” ungkap Pak Ir. Di sebelah kiri berjejer perbukitan yang panjang dan luas, sedangkan di sebelah kanan terhampar pantai dan Samudra Hindia yang jelas tampak. Perjalanan menuju Lhoong itu cukup jauh dan melewati beberapa kawasan hutan lindung. Di sepanjang jalan pun banyak monyet hutan yang lalu lalang, bahkan bermain di tengah jalan. Setelah kira-kira perjalanan dua jam, akhirnya sampai di Gempong Umong Seuribee. Pak Suwardi, Koseka Kecamatan Lhoong sudah menunggu di persimpangan jalan dan mengarahkan kita untuk masuk ke lorong-lorong jalan di desa-desa. Tim BPS dan BRIN memasuki jalan kampung yang kira-kira 2 kilometer dari jalan raya. Dua petugas PPL sudah mencacah warga di teras rumah. PPL menjelaskan bahwa sejauh ini masih aman dan pekerjaan bisa dijalankan dengan baik. Yang menjadi kendala adalah cuaca hujan yang sering datang dengan tiba-tiba. Hal ini bisa diatasi dengan jas hujan di saat mengendarai sepeda motor.

Setelah selesai melihat proses pencacahan di gampong Umong Seuribee, perjalanan berlanjut ke Gampong Sanay. Perjalanan ke Gampong Sanay ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan. Desa ini dulunya penuh dengan warga, tetapi semenjak gelombang tsunami tahun 2004 menggulung daratan ini, seluruh warga pindah ke desa seberang. Desa ini menjadi sekarang menjadi desa kosong tanpa penghuni. Hampir tidak kami temukan bekas rumah dan pemukiman warga. Mungkin hampir sepenuhnya rumah di sini habis disapu ombak yang dahsyat itu. Pada awalnya tim BPS akan mendatangi dan mencacah salah satu warga yang masih tinggal di lokasi Pantai Sanay ini, tetapi setelah ditunggu hampir selama satu jam belum juga bertemu dengan penghuni rumah tersebut. Rumah yang di datangi adalah rumah satu-satunya di kawasan ini, jaraknya

tidak sampai 100 meter dari bibir laut. Rumah ini berada di tengah, di antara pantai dan tambak ikan/udang. Rumah ini berbahan utama kayu dan bambu, tampak sangat sederhana. Pak Suwardi menceritakan bahwa rumah ini masih ditinggali oleh sepasang penduduk. Mereka digolongkan sebagai warga kelas bawah dan menjadi salah satu prioritas untuk dicacah dan dicatat keberadaanya. Kondisi rumah warga yang di datangi cukup memprihatinkan, beberapa terbuat dari bambu dan beralaskan tanah. Lokasi nya pun sangat berbahaya karena tepat di depan pantai. Jika ada ombak atau air pasang, akan rentan tenggelam atau tersapu oleh ombak.

Pada saat menunggu sang pemilik rumah datang, Pak Suwardi banyak menceritakan kondisi sosial ekonomi di masyarakat. Beliau sangat paham mengenai *mapping* karakteristik masyarakat masyarakat Aceh Besar. Beliau ternyata orang lama di BPS, bahkan lebih dari 15 tahun bekerja sama, baik secara organik dan non organik dengan BPS. Sebuah dedikasi dan pengalaman yang panjang. Berbagai macam jenis sensus dan survei pernah beliau jalankan. Berbagai macam posisi



Foto: Eko (2022)

Gambar 9.4 Kepala BPS Aceh Besar menjelaskan aplikasi Regsosek 2022 bersama Penanggung Jawab Lapangan Regsosek Aceh Besar (Cek Mustafa) dan Koseka Kecamatan Lhoong (Pak Suwardi)

seperti pencacah lapangan dan koordinator pernah dijalankan. Hal yang menarik, peran yang dijalani tidak selalu naik perannya di lapangan tetapi sesuai peran kondisi di lapangan. Misalkan pada saat ini menjadi Koseka, periode selanjutnya bisa saja kembali menjadi PPL. Pak Irnanto juga menjelaskan, rata-rata yang menjadi mitra BPS di lapangan, terutama Koseka merupakan mitra lama yang sudah bekerja sama selama lebih dari 10 tahun. Mitra seperti ini yang kemudian dipercaya dan sangat membantu kinerja BPS karena benar benar memahami lapangan dan bekerja dari hati. Bahkan dalam beberapa kegiatan, mereka rela tidak dibayar dalam melaksanakan tugas dan merasa bahagia bisa berkontribusi terhadap masyarakat. Setelah sekian menunggu dan bercerita, satu rombongan yang ditemani oleh 2 PPL dan 1 PML (semuanya perempuan) melanjutkan perjalanan ke sebuah warung kopi di dekat pantai.

Tim BRIN dan petugas BPS di lapangan berdiskusi di sepanjang perjalanan. Diskusi dan bercerita mengenai proses pengambilan data di Kecamatan Lhoong dengan mobil bak terbuka, sambil menikmati angin dari arah pantai. Ketiga perempuan ini adalah perempuan hebat dan tangguh. Medan yang cukup berat mampu dihadapi tanpa menyerah untuk mengumpulkan data demi data. Tantangan di Lhoong ini cukup terjal, wilayahnya berpantai pantai dan berbukit membutuhkan konsentrasi lebih dalam mengendarai motor. Hampir seluruh PPL yang ditemui di lapangan sebagian besar adalah perempuan dan menggunakan sepeda motor dari satu rumah kerumah yang lain. Pendataan dan pencacahan terkadang dilakukan sampai larut malam.

Setelah beberapa saat kita berdiskusi di atas mobil bak terbuka, kita diberikan tanda untuk berhenti sejenak di warung kopi di dekat Pantai Sanay. Satu rombongan ini turun dan memesan kopi. Beberapa gorengan seperti pisang goreng, tempe goreng, dan tahu goreng tersedia di sini. Sebagian besar pelanggan adalah nelayan dan petani yang ada di sekitar Pantai Sanay. Rombongan petani semangka memberikan semangka hasil dari panen petani hari itu. "Maaf, Pak.

Semangkanya segar, tetapi kurang manis, maklum karena tiap hari hujan,” celetuk salah satu petani yang menawarkan semangka.

Tim peneliti dan tim BPS banyak berdiskusi dengan warga lokal yang istirahat sejenak di warung kopi. Mereka sangat ramah dan cukup terbuka dengan masyarakat baru. Budaya ngopi menjadikan kegiatan kali ini agak terbantu karena berbagai informasi dan isu di masyarakat bisa didapatkan secara mudah dan asli. Sambil menikmati buah semangka, kami berdiskusi mengenai isu di desa dan isu mengenai pertanian.

Hari semakin gelap dan mendung sudah bergelayut di langit langit Lhoong. Tim BRIN dan Regsosek beranjak pamit pulang dari warga masyarakat. Tepat jam 17.30 WIB, tim pulang menuju Banda Aceh dengan estimasi perjalanan selama dua jam. Pada saat makan malam hari, penerangan jalan raya sangat minim. Kanan kiri merupakan hutan yang sangat lebat. Dapat dibayangkan perjuangan pencacah dan koordinator lapangan, mengingat medan dan bentang alam yang di lewati terasa sangat menantang dan berliku.

3. Episode Pegunungan Seulawah

Pagi itu tim peneliti BRIN dijemput di hotel oleh Cek Mus sekitar jam 08.00 WIB pagi. Perjalanan dilanjutkan menuju Jantho, ibu kota Kabupaten Aceh Besar, dibutuhkan waktu kurang lebih satu jam perjalanan. Terlintas hanya beberapa mobil saja yang melintas di jalan tol ini. Bisa dihitung dengan jari tangan. Tim peneliti tiba di kawasan perkantoran pemerintah daerah sekitar jam 09.00 WIB dan berdiskusi dengan beberapa pegawai BPS Kabupaten Aceh Besar mengenai pelaksanaan Regsosek tahun 2022. Tim peneliti meminta izin membawa beberapa berkas dari BPS untuk saya bawa pulang. *Banner* Sensus Pertanian 2023 sudah terpajang di dinding utama kantor BPS. “Pak Eko dan Pak Badrun nanti diantarkan oleh pak Baha, ya,” ucap Cek Mus di kantor BPS Kabupaten. Cek Mus harus mengurus beberapa administrasi di kantor sehingga belum bisa mengantarkan kami kali ini. Tujuan kami di hari Jumat ini

adalah ke Pegunungan Seulawah. Kawasan ini berada di Kecamatan Seulimeum dan Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar. Sungguh perjalanan yang panjang dan terjal. Dari Jantho, ibu kota kabupaten, kira-kira membutuhkan waktu dua jam perjalanan. Perjalanan menggunakan mobil diesel, yang konon katanya memang cocok untuk melewati lokasi-lokasi yang ekstrem. Jalan yang di lewati merupakan jalan beraspal yang sebagian sudah rusak. Beberapa jembatan juga sudah rusak dan cukup sulit untuk dilewati bagi yang belum berpengalaman di lokasi ini. Di sepanjang jalan masuk ke desa, kurang lebih 10 km dengan hutan di sepanjang jalan. Desa yang di tuju adalah Gampong Panca Kubu. Tim peneliti BRIN ditemani oleh dua orang anggota PPL dan 1 Koseka. Ketiganya merupakan perempuan hebat yang pantang menyerah untuk mengumpulkan data lapangan.

Setiba di lokasi, K (Insisial) sudah menunggu kedatangan tim peneliti BRIN dan tim BPS. Warga pun sudah siap menunggu dan mempersiapkan masuk ke rumah warga. Wawancara dilakukan di ruang belakang rumah (dapur), beberapa ekor kambing berada pas di samping kami. Pencacahan berlangsung cukup lancar karena penduduk yang dicacah tergolong masih muda dan sangat kooperatif kepada PPL (Gambar 9.5).



Foto: Eko (2022)

Gambar 9.5 PPL melakukan pendataan.

Target responden kedua untuk dicacah adalah seorang ibu-ibu rumah tangga yang sedang menggendong dan menidurkan anaknya di teras rumah sambil menjaga warung kelontong. Tanpa perlu waktu lama, petugas PPL yang memang berdomisili di wilayah ini cepat untuk menanyakan pertanyaan dan mengisi kuesioner. Tak perlu waktu lama untuk berbasa-basi karena mereka sudah saling mengenal dan bahkan memang keluarga dekat. Kendala kali ini datang dari jaringan internet karena perlu beberapa foto yang harus di-*tagging* ke dalam ponsel. Petugas PPL berkeliling rumah untuk mengambil gambar (foto) dan mengunggahnya. Namun, ada terkendala jaringan internet.

Tidak terasa waktu menunjukkan pukul 12.00 WIB, hari ini adalah hari Jumat yang artinya harus melaksanakan jumatatan. Masjid yang di datangi cukup terpencil dan saya ingat hanya ada satu saf (barisan) laki-laki dewasa (termasuk kami) dan setengah saf anak-anak di barisan kedua. Jumlahnya sangat sedikit dan tak sampai 40 orang yang mengikuti salat Jumat kali ini. Setelah salat Jumat, kami bergegas pulang karena hujan deras nampaknya akan datang. *Driver* takut tidak bisa menyebrang sungai karena memang tidak ada jembatan. Benar saja hujan turun lebat, untungya tim sudah melewati sungai. Setelah jumatatan, wawancara dilanjutkan kepada PPL, PML, dan Koseka selama kurang lebih satu jam di rumah penduduk, sambil berharap hujan reda. Infrastruktur jalan, telekomunikasi, dan jarak tempuh menjadi hambatan dan tantangan bagi PPL dalam mengambil data lapangan.

4. Episode Sabang

Sabtu pagi jam 06.30 WIB tim peneliti BRIN berangkat menuju Pelabuhan Ulee Lheue. Tiket ke Sabang dengan menggunakan kapal cepat Express Bahari seharga 100 ribu rupiah. Sebenarnya ada kapal lain, yakni kapal feri, harganya pun lebih murah, Rp28.000,00. Permasalahannya, kami sudah ditunggu di jam 09.00 WIB oleh Koseka BPS Sabang di kantornya, di Jalan Teuku Umar, nomor

28, Sabang. Tepat jam 08.00 WIB kapal sudah bergerak meluncur menuju Pelabuhan Balohan. Kapal yang kami tumpangi benar-benar nyaman dan cepat, berbeda dengan kapal-kapal sebelumnya yang terbuat dari kayu dan siapa saja bisa langsung masuk tanpa perlu tiket. Pemandangan yang indah, perbukitan dan laut menyatu dalam satu *landscape*. Hal ini menjadikan perjalanan tidak terasa lama. Benar saja, sebelum jam 09.00 WIB tim peneliti sudah mendarat di pelabuhan disambut oleh anak-anak yang berenang di sekitar kapal, berharap uang yang ditaburkan penumpang dari kapal. Perjalanan kali ini berbeda dengan bentang alam pada episode sebelumnya (Breueh, Lhoong, Seulawah), kali ini terasa lebih landai dan nyaman (Gambar 9.6).

Sekitar jam 09.00 WIB tim tiba di kantor BPS dan sudah ditunggu oleh Koseka. Salah satu yang menjadi kendala terbesar adalah kurangnya personel di wilayah Sabang. Jumlah penduduk yang akan disensus tidak sebanding dengan jumlah PPL yang tersedia. Beberapa persyaratan membuat tidak semua calon pendaftar PPL diterima karena mereka harus memiliki ponsel dengan spesifikasi tertentu. Tidak semua pemuda mampu menyanggupi persyaratan tersebut.



Foto: Eko (2022)

Gambar 9.6 Tim Regsosek Pulau Aceh Bersama Tim Peneliti dan Penanggung Jawab Lapangan (Cek Mus Kab Aceh Besar)

Meskipun demikian, BPS dari Sabang akan berusaha semaksimal mungkin. Dalam *trackrecord*-nya, Pak A (Inisial) menyatakan bahwa pada sensus-sensus sebelumnya, Kota Sabang selalu target terpenuhi di atas 95% dari populasi. Hal ini yang tetap harus dijaga sebagai sebuah prestasi tersendiri di tengah keterbatasan yang ada.

Sabang sebagai sebuah kota administrasi memiliki karakteristik yang cukup unik. Warga masyarakatnya merupakan perpaduan etnis, bahasa, dan agama yang berbeda. Karakteristik masyarakat yang cukup beragam ini menjadikan Sabang sebagai salah satu kota yang dinamis. Sarana dan prasarana di Sabang pun cukup cukup baik. Dari pantauan observasi di lapangan, jalan-jalan raya yang ada di Sabang tampak bagus dan rapi. Sepanjang jalan kota menuju titik 0 (nol) kilometer juga sangat bagus. Infrastruktur jaringan informasi juga cukup baik. Hampir di setiap sudut tempat, terdapat sinyal yang baik dari dua *provider* yang berbeda. Di kota ini juga terdapat daerah Pecinan. Dalam prosesnya terdapat sebuah pola pendataan yang khas di wilayah ini. Toko-toko di wilayah ini akan tutup pada jam 13.00 WIB sampai 17.00 dan buka lagi setelah magrib. Artinya, pendataan harus mengikuti ritme dan pola pada kawasan tersebut. Terdapat juga kawasan (X) yang merupakan kawasan *keras*, seseorang petugas harus memiliki mental kuat untuk turun ke daerah ini. Seorang PPL yang diwawancarai R (inisial) sering dipanggil dengan panggilan tertentu yang bagi sebagian orang merupakan ungkapan dan pernyataan kasar. Perlu ada pendekatan khusus dan penempatan terhadap PPL di lapangan.

Beberapa kendala yang dihadapi adalah mengenai beberapa varian data/aplikasi yang diusulkan pada saat sensus berlangsung. Bahkan, ketika pencacahan terhadap kawasan/individu selesai, data susulan yang dibutuhkan baru tiba. Protes dari PPL sempat dilayangkan, tetapi kemudian bisa diatasi secara baik oleh semua pihak. Diskusi kali ini dilakukan secara bergilir dan diadakan di kantor BPS Kota Sabang, tetapi cukup lengkap, mulai dari 2 Koseka, 2 PML dan 2 PPL. Diskusi ini dilakukan sampai kira-kira jam 13.00 WIB. Setelah usai dari kantor BPS, kami mengamati kondisi real di lapangan. Kurang lebih satu

jam melintasi kota Sabang, tak terasa sampai ujung dan menyentuh titik kilometer 0 (nol) Indonesia. Tak lupa tim juga menyempatkan untuk meminum es kelapa muda sambil memandangi samudra luas Samudra Hindia. Tim peneliti kembali ke kapal feri tepat jam pukul 16.00 WIB, perjalanan pulang ke Banda Aceh diiringi hujan yang cukup deras dan pukul 17.30 WIB sampai di Pelabuhan Ulee Lheue.

Berbagai episode perjalanan lapangan ini memberikan gambaran bahwa untuk melakukan pencacahan, diperlukan perjuangan yang tidak mudah. Berbagai wilayah baik perkotaan dan pedesaan memiliki tantangan yang berbeda. Pada wilayah perkotaan, gerak mobilitas warga sangat cair dan fleksibel sehingga membutuhkan kejelian dan kesabaran petugas PPL. Pada wilayah pedesaan, terutama pada wilayah yang sulit seperti di kepulauan dan pegunungan juga membutuhkan kondisi fisik yang prima. Pemahaman akan geografis dan budaya masyarakat juga menjadi penting. Langkah strategis dan efektif yang dilakukan oleh BPS untuk para petugas lapang adalah dengan mengutamakan warga yang berdomisili pada wilayah yang akan dicacah menjadi prioritas rekrutmen. Jika tidak ada warga di domisili tersebut yang mendaftar baru, akan direkrut petugas lapang dari wilayah sekitar. Dengan pemahaman geografis, historis, dan budaya ini diharapkan mampu membuat kinerja menjadi efektif dan aman bagi petugas lapangan.

C. Menelisik Awal Pemahaman Proses Bisnis Registrasi: Dari Nasional Ke Lokal

Sebagai sebuah proyek nasional, proses bisnis survei memiliki mekanisme yang ketat dan kaku. Berbagai perencanaan strategis dan operasional sudah disiapkan secara matang oleh para teknokrat, ahli statistik, dan pengambil kebijakan. Proses *top down* ini memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan. Maksud dan tujuan dari pusat perlu diterjemahkan secara baik oleh pelaksana di level kabupaten hingga desa.

Kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022 ini secara sederhana bisa dimaknai sebagai proses mencatat tentang pola dan tata kehidupan sosial ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia. Karena merupakan proses mencatat ulang (meregistrasi), kegiatan ini sama halnya seperti pelaksanaan sensus penduduk yang sudah dilaksanakan sebelumnya (terakhir pada 2020). Karena dengan sensus penduduk, banyak pihak yang mempertanyakan kenapa ada Regsosek, kalau sebelumnya sudah ada sensus penduduk, yang jaraknya belum terlalu lama?

Pendataan Regsosek adalah pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) adalah upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal, atau satu data. Dengan menggunakan data tunggal, pemerintah dapat melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien (Gambar 9.7). Data Regsosek juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas berbagai layanan pemerintah seperti pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, hingga administrasi kependudukan. Regsosek penting untuk segera



Foto: Eko (2022)

Gambar 9.7 Pencacahan PPL dengan Kepala BPS Aceh Besar kepada Bupati Aceh Besar

dilakukan karena masih terbatasnya cakupan data sosial ekonomi penduduk yang ada, yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh program dan layanan kepada masyarakat (BPS, 2022).

Program Regsosek ini digagas Kementerian PPN/Bappenas. Salah satu tujuannya adalah untuk menyediakan data dasar tentang kondisi sosial ekonomi rakyat Indonesia yang sangat penting dalam upaya melakukan reformasi sistem perlindungan sosial di Indonesia. Jadi, tidak heran jika pertanyaan yang dilontarkan dalam blanko pencacahan di Regsosek ini banyak berkaitan dengan kondisi (dan status) sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk di dalamnya bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat.

Dalam skema perlindungan sosial di Indonesia, bantuan sosial adalah satu alat negara dalam melindungi warga negaranya, khususnya warga negara yang berada di bawah garis kemiskinan. Menurut situs BPS, data Regsosek ini setidaknya mencakup data: 1) kondisi sosio-ekonomi demografis, 2) kepemilikan aset, 3) kondisi sanitasi air bersih, 4) kondisi perumahan, 5) kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus, 6) informasi geospasial, 7) tingkat kesejahteraan, dan 8) informasi sosial ekonomi lainnya (BPS, 2022).

Ada beberapa pihak juga mempertanyakan jika program ini (Regsosek) itu dari Kementerian PPN/Bappenas, mengapa dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), mengapa tidak langsung saja Bappenas yang melaksanakan? Iya, BPS sebagai salah satu lembaga negara dengan tugas utamanya adalah dalam bidang penyediaan data statistik nasional. Di samping itu, BPS memiliki jaringan langsung terkait pendataan sampai ke masyarakat bawah (desa/kelurahan) dengan sebutan sebagai Mitra Statistik. Jadi, BPS ini merupakan salah satu lembaga/badan pemerintah vertikal yang memiliki jalur perintah (komando vertikal) sampai tingkat kabupaten/kota, bahkan hingga ke kecamatan-kecamatan. Di tingkat kecamatan, BPS memiliki SDM representasi yang biasa disebut dengan Koordinator Statistik Kecamatan (Koseka, dahulu diistilahkan dengan Mantri Statistik).

D. Antara Nilai Positif dan Tantangan dalam Mendata

Nilai positif dari pelaksanaan Regsosek adalah sebagai upaya untuk memastikan epistemologi dan aksiologi data untuk kesejahteraan masyarakat. Secara epistemologis, instrumen, konsep, dan variabel yang digunakan untuk menghasilkan data sudah dirumuskan secara matang. Kolaborasi antara petugas organik dan non organik BPS sebagai motor dan pelaksana Regsosek berjalan cukup apik. Petugas PPL dan PML yang merupakan warga lokal menjadi nilai positif dalam mendata. Warga lokal dianggap memiliki pengetahuan dan cara yang tepat dalam mendapatkan data di lapangan. Pada kawasan pedesaan dan lokasi tertentu membutuhkan sebuah pendekatan khusus yang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. PPL lokal memiliki pengetahuan kapan, dimana, dan suasana yang tepat dalam mendata. Di kawasan Aceh dengan karakteristik pedesaan, waktu yang tepat untuk melakukan pendataan adalah di waktu sore dan malam hari. Pada pagi dan siang hari, sebagian masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan masih berladang dan pergi kesawah. Pada lokasi pesisir di wilayah Aceh juga memiliki karakteristik sosial budaya yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan. Secara umum masyarakat yang tinggal pada wilayah pesisir memiliki suara dan sikap yang lebih tegas dibandingkan masyarakat pegunungan. Pada kawasan tertentu, terdapat kawasan yang bahaya untuk didatangi oleh warga asing. Strategi yang dilakukan adalah dengan menugaskan seseorang warga lokal yang memahami lokasi dan kebiasaan warga di lokasi tersebut.

Berbagai tantangan dihadapi dalam mendata. secara umum ada dua tantangan utama, yakni tantangan teknis dan kultural. Secara teknis banyak keluhan dari PPL dan PML mengenai variabel tambahan di tengah pendataan dan pencacahan data. Penggunaan *geotagging* juga memiliki kendala di kawasan-kawasan yang tidak memiliki akses sinyal yang bagus. Secara kultural, petugas PPL harus menjelaskan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Regsosek ini. Secara umum masyarakat memiliki pandangan bahwa pada saat pendataan

dilakukan, maka akan segera turun bantuan dari pusat. Tantangan lainnya adalah mengenai luasnya wilayah Kabupaten Aceh Besar. Kawasan Aceh Bbesar yang membentang dari Pegunungan Seulawah sampai dengan kepulauan Breueh di perbatasan laut lepas Samudra Hindia. Bentang tanah yang luas memiliki berbagai tantangan yang sangat luar biasa.

E. Makna dan Harapan dalam Mendata

Regsosek kali ini memiliki jutaan makna dan harapan bagi seluruh insan masyarakat Indonesia, entah itu dari kalangan elit atau dari kalangan rakyat biasa. Sebuah momentum untuk saling kolaborasi dan kerja sama membangun bangsa. Pemaknaan terhadap proses pendataan sensus penduduk atau Regsosek tahun 2022 disikapi beragam oleh berbagai kalangan.

Secara politis, banyak yang menduga dan mencurigai ini berkaitan dengan kepentingan politis praktis tertentu. Bagi masyarakat awam dan masyarakat kelas bawah, proses pendataan mengisyaratkan akan segera datang bantuan dari pemerintah. Beberapa diantaranya, bahkan mendatangi kantor BPS karena setelah disensus, bantuan tak kunjung datang. BPS sebagai eksekutor lapangan tentu memiliki berbagai tantangan dan hambatan, tetapi pengalamannya selama lebih dari 5 dekade dalam menyensus tentu akan memberi pengalaman dan strategi yang jitu.

Sesuai dengan tema sensus BPS tahun ini, “Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi: Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.” Oleh karena itu, isu yang paling penting untuk ditangkap adalah isu mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Masyarakat kelas bawah atau yang biasa dikatakan sebagai masyarakat miskin menjadi salah satu target utama pendataan dalam sensus Regsosek kali ini. Data dari BPS Aceh Besar (2021) pada triwulan pertama, angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar sebanyak 60.260 orang (14,05%), bertambah

sekitar 560 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2020 yang jumlahnya 59.700 orang (13,84%).

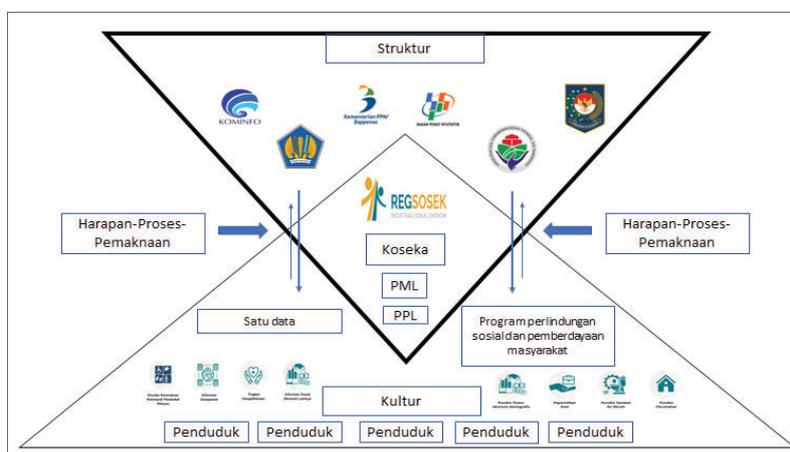
Angka kemiskinan ini menarik untuk ditelisik lebih jauh sebagai upaya pemanfaatan data tunggal, pemerintah dapat melaksanakan berbagai program secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien. Isu mengenai kemiskinan menjadi pembahasan yang paling krusial, sensitif, tetapi selalu aktual untuk dibahas di warung kopi sampai dengan meja parlemen. Petugas lapangan pun sangat memahami mengenai isu ini dan sangat berhati-hati dalam mencacah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pada proses pendataan di lapangan PPL cukup berhati-hati untuk menanyakan hal-hal yang terkadang dianggap sensitif bagi masyarakat. Secara umum dari pengamatan dan wawancara di lapangan, proses sensus penduduk masih diartikan sebagai pintu masuk bantuan kepada masyarakat. Paradigma ini yang terus berkembang dan diproduksi dalam alam bawah sadar masyarakat.

Secara kultural, masyarakat yang kami kunjungi rata-rata memiliki etos kerja yang tinggi. Pada masyarakat nelayan, mereka bahkan berhari-hari sanggup bekerja di lautan lepas. Hal yang menarik mengenai etos kerja kultural, di dalam kapal nelayan dengan kapal yang relatif kecil sudah tersedia listrik. Nelayan ini membawa beras, *magic jar*, telur, air, dan persediaan lainnya. Konon ada yang sampai satu minggu di tengah laut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kita memiliki etos kerja dan harapan tinggi untuk menghidupi keluarga. Hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan dimaknai sebagai sebuah perjuangan, terutama untuk keluarga. Secara kultural dan mikro, terutama pada seseorang yang sudah berkeluarga, maka dia harus bertanggung jawab dengan keluarga dan memberikan rezeki yang halal. Di lapangan, sebenarnya lebih dibutuhkan mengenai sarana dan fasilitas mendasar. Kebutuhan pangan, sumber daya listrik, infrastruktur transportasi, kesehatan, telekomunikasi, dan sekolah perlu mendapatkan perhatian terutama pada masyarakat yang hidup di kepulauan atau wilayah terluar Indonesia. Harapan masyarakat tidak jauh pada kebutuhan dasar ini. Pada konteks sensus, peneliti

berharap akan terbit berbagai kebijakan strategis untuk masyarakat umum dan khususnya pada masyarakat yang tergolong membutuhkan bantuan khusus, sebagaimana tampak dalam Gambar 9.8.

Bagi *stakeholder* makro, data dimaknai sebagai penunjuk jalan dan arah kebijakan yang akan diambil pada masa mendatang. Perlindungan sosial menjadi isu prioritas dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kolaborasi antar kementerian dan lembaga menjadi sangat penting antara Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Dari data ini kelak akan dirumuskan program dan kebijakan serta layanan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem.

Bergabungnya enam kementerian/lembaga dalam satu konteks sensus, merupakan sebuah makna yang perlu disikapi secara optimisme. Pada beberapa era sebelumnya, data antar kementerian/ lembaga sering kali berbeda sehingga terdapat tumpang tindih dalam merancang dan melaksanakan sebuah program. Pemaknaan terhadap



Gambar 9.8 Regsosek: Antara Pemaknaan dan Harapan

tujuan dan data tunggal memberi jalan efisiensi dan tepat sasaran bagi masyarakat, semoga. Data tunggal dan padu sangatlah penting bagi masyarakat Indonesia saat ini. Struktur negara (pemerintah) melalui perpanjangan tangan kementerian/lembaga memiliki kuasa untuk membuat berbagai program kepada masyarakat. Pada sisi yang lain program (struktur) ini berhadapan (*vis a vis*) kultur masyarakat (penduduk). Hal ini yang sering kali tidak ada titik temu (belum) antara harapan pemerintah dengan keinginan penduduk. Melalui serangkaian kerja sama antar-*stakeholder* pemerintah ini, penulis optimis bahwasanya satu data tunggal ini nanti benar-benar memberikan harapan dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat dari serangkaian pelaksanaan sensus ini.

Masyarakat memiliki pemaknaan yang beragam mengenai proses pendataan di lapangan. Sebagian masih beranggapan bahwa ini merupakan proses administrasi negara yang penting untuk dilakukan. Sebagian lagi memaknai dengan sikap apatis, dari hasil wawancara dengan PPL beberapa warga ogah-ogahan dan beberapa ada yang menghindari ketika didata. Beberapa masyarakat sudah menduga dan mencium ada kepentingan politis karena sudah mendekati pemilu. Sebagian masyarakat memaknai pendataan ini sebagai jalan masuk bantuan, beberapa diantaranya mengakui dan menganggap dirinya miskin agar segera mendapat limpahan bantuan langsung. Mungkin hanya sedikit dari beberapa masyarakat yang menganggap bahwa kegiatan semacam ini mampu membangun dan menyejahterakan mereka. Kami peneliti belum mampu mempresentasikan dan menabulasikan jumlah-jumlah persepsi masyarakat mengenai sensus Regsosek kali ini karena keterbatasan waktu dan keterbatasan lainnya.

Satu data tapi beragam makna. Mungkin itu ungkapan yang cukup relevan untuk menggambarkan sensus Regosesek tahun 2022. Dengan waktu persiapan yang cukup singkat, tentu menjadi tantangan sendiri terutama bagi tim pelaksana di lapangan. Bagi petugas PPL, hajatan sensus selalu di nanti nanti kedatangannya karena dari hasil pekerjaan ini mereka mendapatkan tambahan penghasilan yang cukup besar. Dari sejauh pengetahuan peneliti, PPL memiliki kedisiplinan

yang tinggi dan juga semangat kerja yang militan. Sebuah *track record* baik yang coba diukir oleh PPL ini diharapkan pada kesempatan-kesempatan selanjutnya akan dipanggil lagi dalam hajatan akbar sensus penduduk nasional.

F. Dukungan Kelembagaan Lokal

Keberhasilan pelaksanaan Regsosek tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, khususnya para pemangku kepentingan, mulai dari tingkat pusat sampai ke hilirnya. Untuk tingkat pusat, tentunya koordinasi intensif diantara pemangku di tingkat pusat, antarkementerian/lembaga negara dan inter-kementerian/lembaga negara, sudah pasti. Berlanjut ke tingkat provinsi, bersama gubernur sebagai kepala daerah provinsi beserta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait (dinas dan badan di daerah). Di tingkat kabupaten/kota, adalah dengan Kepala Daerah Bupati atau Walikota, beserta jajarannya, yaitu dinas dan badan terkait.

Di Kabupaten Aceh Besar pun demikian adanya. Dukungan dari pemangku kepentingan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai tingkat *gampong* (Desa) pun terlihat sumbangsuhnya. Mulai



Foto: Eko (2022)

Gambar 9.9 Pencacahan PPL kepada Warga

dari pemerintah daerah (penjabat bupati), sampai ke tokoh-tokoh masyarakat dalam satuan lingkungan setempat (SLS), bisa kepala desa (*Keucik*) hingga ketua RT. Di beberapa wilayah (*gampong*) yang dikunjungi, terkadang kami berpapasan dan bercengkrama dengan para Babinsa (TNI) dan Babinkamtibmas (Polri). Mereka berdua ini yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat di desa (*gampong*).

Kebetulan, tim berkesempatan bertemu dengan Penjabat Bupati Aceh Besar, Bapak Muhammad Iswanto. Waktu itu, kami bertemu dengan Bapak Muhammad Iswanto ditemani Kepala BPS Kabupaten Aceh Besar (Bapak Irnanto). Di sini kami melihat sekaligus menyaksikan secara langsung bagaimana proses pencacahan Regsosek kepada tokoh masyarakat, orang nomor satu di Kabupaten Aceh Besar. Proses wawancara tidak berlangsung lama, sekitar 30 menit. Kemudian, Penjabat Bupati menyampaikan ucapan terima kasih dan juga dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan Regsosek ini, artinya bahwa pemerintah daerah setempat yaitu dalam hal ini adalah perintah Kabupaten Aceh Besar sangat mendukung kegiatan Regsosek. Bahkan dalam sambutannya, Penjabat Bupati juga menyampaikan bahwa beliau sudah memberikan arahan kepada segenap unsur di Kabupaten Aceh Besar untuk mendukung Regsosek ini.

Kabupaten Aceh Besar dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 122.497 KK, yang tersebar di 13 kecamatan, dengan tenggat waktu pencacahan selama satu bulan (harus tuntas dalam tempo 30 hari), merupakan sebuah amanah yang tidak mudah. Kenyataan ini sebuah kerja dan usaha besar dan berat (Gambar 9.9). Oleh karena itu, dukungan berbagai pihak, sangatlah diperlukan. Untuk menjawab amanah ini, BPS Kabupaten Aceh Besar mengerahkan tidak kurang 29 Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka), 144 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) dan 539 Petugas Pendataan Lapangan (PPL) yang setiap hari tertungkus lumus, dan berjibaku mengumpulkan data dari pagi hingga malam hari.

Kebetulan kami juga berkesempatan mengunjungi salah satu dusun, di wilayah pegunungan, Seulanga nama dusunnya, dengan

jumlah kepala keluarga sebanyak 28 KK. Dusun Seulanga berjarak satu sampai dua jam perjalanan dari ibu kota kabupaten, Jantho. Dari kota kabupaten menuju Dusun Seulanga dapat ditempuh dengan jalan darat menggunakan kendaraan roda empat, walau harus melewati hutan, sungai, dan juga kebun penduduk. Dusun Seulanga ini merupakan bagian dari wilayah *Gampong*/Desa Pancakubu, bersama dua dusun lainnya, yaitu Dusun Matahari dan Dusun Keupula. Dusun Matahari dihuni oleh kurang lebih 26 KK, sedangkan Dusun Keupula dihuni oleh enam kepala keluarga. Di Dusun Seulanga kami berkesempatan melihat dari dekat pencacahan yang dilakukan oleh PPL setempat. Dukungan pemangku kepentingan pada tingkat paling bawah pun kami rasakan di sini, yaitu dukungan dari tokoh masyarakat setempat. Kami diterima oleh salah satu tokoh masyarakat dan dipersilakan menunggu sementara PPL melakukan wawancara pencacahan.

Tim peneliti berkesempatan berbincang ringan dengan Pak Hendrik, yang kebetulan adalah paman dari PPL di Dusun Seulanga ini, saudari Kiki (Kiki Andriyani). Pak Hendrik pun mengutarakan jika pihak *gampong* melalui *keucik* (kepala desanya), Ibu Mayasari, sangat mendukung Regsosek ini. Bahkan, dukungan juga datang dari Babinsa dan Babinkamtibmas di Desa Panca. Keucik, Babinsa, Babinkamtibmas, kepala dusun, ketua-ketua RT pun serempak mendukung Regsosek ini dengan saling mengingatkan kepada para warganya bahwa akan datang petugas untuk pencacahan, mohon diterima dan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Kunjungan perjalanan kami ke Dusun Seulanga, Desa Panca, Kecamatan Lembah Seulawah ini kami mulai dari Kantor BPS Kab Aceh Besar di Jantho. Kami diantar oleh Bang Bahagia (Baha), adalah Mitra Statistik BPS Aceh Besar, juga Kak Mairona, Koseka Kecamatan Lembah Seulawah, dan Kak Rahmatun, PML Lembah Seulawah.

Dukungan kelembagaan terhadap Regsosek di Wilayah Aceh juga dijumpai pada saat kami berkunjung ke Pulau Weh, pulau di ujung paling barat Republik ini, tepatnya di Sabang. Hasil diskusi dan perbincangan bersama para Koseka di Sabang dan beberapa PML dan PPL yang lain menyatakan bahwa bahwa Babinsa dan

Babinkamtibmas ini perannya sangat besar dalam kelancaran Regsosek di wilayah Sabang. Khususnya di Kota Sabang, terkadang dijumpai warga yang sepertinya tidak berkenan untuk didatangi dan dilakukan wawancara pencacahan. Walaupun sebelum kunjungan pencacahan dilakukan, pihak PPL dan Koseka setempat telah menyampaikan rencana kunjungannya, hari kapan jam berapa. Namun, pada saat kunjungan, warga (sengaja) tidak ada di rumah.

Setelah diadakan kunjungan ulang berkali-kali, akhirnya mereka mencoba menggandeng Babinsa atau Babinkamtibmas untuk bersama-sama mendatangi rumah warga yang beberapa kali kunjungan selalu tidak dapat ditemui. Dengan kunjungan bersama Babinkabtimas, akhirnya tim pencacah bisa bertemu dan melakukan wawancara pencacahan dengan yang bersangkutan. Beberapa kasus semacam ini misalnya dapat ditemukan di wilayah Sabang Kota, demikian ungkap Bang Adil, Koseka Kota Sabang.

Selama eksplorasi singkat di Pulau Weh, tepatnya di Kota Sabang, untuk melihat dari dekat proses Regsosek kawan tim Kota Sabang, kami difasilitasi oleh Pihak Badan Pengusaha Kota Sabang (BPKS). Sebelumnya, salah satu Deputy BPKS, Bapak Zamzam¹, memang menjanjikan jika tim peneliti akan berkunjung dan melihat proses Regsosek di Kota Sabang. Beliau (Pak Zamzam) membantu semampunya, misalnya untuk urusan akomodasi dan transportasi. Akhirnya, selama melihat proses Regsosek di Kota Sabang kami diantar oleh salah seorang karyawan BPKS, yaitu Bang Randa (Randa Pratama). Dukungan selama kami di Pulau Weh ini juga menunjukkan bahwa secara kelembagaan, institusi yang ada di Kota Sabang juga turut serta mensukseskan kegiatan Regsosek di Kota Sabang.

1 Perkenalan kami dengan Bapak Zamzam terjadi saat Tim berkunjung ke Pulau Aceh (Pulau Beureuh). Dimana pada saat itu kami menginap dua malam di penginapan milik BPKS. Perkenalan dan perbincangan seputar Regsosek bersama Pak Zamzam pada dua malam selama di penginapan juga menjadikan ketertarikan tersendiri bagi Pak Zamzam tentang seputar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Bahkan, dengan lebih bersemangat, Pak Zamzam sangat berkeinginan untuk menjalin kerja sama dengan BRIN untuk mengembangkan Wilayah Kota Sabang.

G. Life Story Pendata: Suatu Pembelajaran Baik

Gelombang tsunami meluluhlantakkan Pulau Breueh pada tahun 2004. Gelombang ini berasal dari barat arah pulau, dari Ssamudra Hindia. Konon katanya sekitar 70% penduduk Pulau Breueh dinyatakan hilang dan meninggal dunia akibat peristiwa alam ini. Diperkirakan hanya sekitar 30% jumlah penduduk yang bertahan hidup. Pak R (inisial) kira-kira berusia 80-an tahun merupakan bagian dari yang terselamatkan dari sapuan gelombang tsunami. Selama di Pulau Breueh kami berjumpa dalam dua kali kesempatan yang tidak disengaja. Pertama tim peneliti berjumpa pada saat saya mengikuti tim PPL menyisir rumah warga untuk melakukan pencacahan. Pada saat melakukan pencacahan di Pulau Breueh tak kurang dari lima rumah dikunjungi.

Terdapat hal yang menarik dalam kunjungan kali ini. Sebagian besar penduduk yang ditemui untuk melakukan pencacahan lebih banyak warga yang berusia lanjut. Mungkin banyak penduduk yang berusia muda sedang pergi berlayar atau bekerja. Hal ini belum terlalu banyak dialami karena keterbatasan waktu. Perjumpaan yang kedua adalah pada saat kami jalan-jalan pagi dan *ngopi* di sebuah warung kopi di bibir Pantai Lempuyang. Beliau mengutarakan bahwa pulau ini luluh lantak disapu air bah kala itu. Warga terpaksa hanya mengandalkan beberapa sumber daya yang ada untuk bertahan, seperti ubi dan singkong yang dibakar. Bantuan pun juga baru tiba setelah waktu satu minggu pasca terjadinya tsunami.

Pak R sebagai penyintas tsunami dan juga merupakan salah satu tokoh yang dituakan di Pulau Breueh seolah mewakafkan hidupnya untuk masyarakat Breueh. Dari hasil diskusi singkat, beliau bersedia memberikan waktu tenaga dan pikirannya untuk masyarakat Pulau Breueh. Beliau juga menceritakan bahwa dua tahun pasca kejadian gelombang tsunami, kapalnya digratiskan untuk melayani rute Pulau Breueh ke Banda Aceh dan tanpa memungut bayaran dari masyarakat. Hal ini dilakukan karena pada waktu tersebut masyarakat memiliki keterbatasan yang sulit dalam bidang ekonomi. Kondisi pendapatan juga belum stabil pasca terjadinya gelombang tsunami yang dahsyat

itu. Pak R merupakan sosok warga yang kami kunjungi pada saat Regsosek dan menjadi salah satu cerminan masyarakat Indonesia yang mengutamakan kebersamaan dan asas gotong royong (Gambar 9.10).

Pak R masih memiliki harapan bahwa beberapa potensi lokal di Pulau Breuh dapat dimaksimalkan. Potensi pohon dan buah kelapa yang sangat banyak tumbuh di pulau ini mampu dimanfaatkan secara maksimal. Pak R menuturkan bahwa pada era dahulu hampir seluruh pulau ini ditumbuhi oleh pohon kelapa karena surplus buah kelapa dijual sampai ke Banda Aceh. Hal yang menjadi ironis pada saat ini justru warga di Kecamatan Aceh Pulo yang membeli kelapa dan minyak kelapa dari daratan Sumatra. Potensi-potensi lokal yang sederhana seperti ini yang seharusnya mampu dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Keluarga yang menarik untuk diliput salah satunya berada di pinggir Pantai Sanay. Setelah menunggu kira-kira satu jam di depan rumahnya, kita satu tim belum juga mendapatkan penduduk tersebut. Padahal, waktu juga sudah menjelang magrib, waktu yang biasa untuk para petani pulang ke rumahnya. Namun, sayang kami belum mendapatkan data langsung dari si empunya. Kami hanya bertemu Pak Kadus yang kebetulan menyusul kita di rumah penduduk tersebut.

Hal yang menarik adalah bahwa rumah ini menjadi satu satunya rumah yang masih berdiri (didirikan) di kawasan Pantai Sanay yang sebelumnya luluh lantak karena hantaman tsunami. Dilihat dari bentuk dan bahan rumah, sangatlah unik. Rumah ini hampir seluruhnya terbuat dari bambu dan kayu dengan bentuk rumah panggung, kira-kira seluas 3×5 meter. Sumur pun juga sederhana dengan mengandalkan timba manual yang dikelilingi dinding bambu setinggi sekitar 2 meter. Rumah ini dikelilingi tambak udang dan hanya kira-kira 100 meter dari bibir pantai. Sebuah lokasi yang sebenarnya sudah dihimbau untuk dihindari sebagai sebuah pemukiman penduduk. Jalan untuk menuju ke rumah ini juga jalan tanah dan tidak beraspal, tetapi bisa dijangkau dengan mobil kendaraan roda empat.

Kisah menarik dari penduduk yang dicacah dari Lembah Seulawah adalah bahwa warga di sini sebagian besar merupakan trans



Foto: Eko (2022)

Gambar 9.10 Salah Satu Korban Tsunami Aceh Tahun 2004

dari Jawa. Jarak antar rumah di kawasan Dukuh Panca Kubu ini cukup jauh, rata-rata jaraknya di atas 100 meter. Warga di sini juga memiliki kebun yang cukup luas, rata-rata warga memiliki tanaman buah-buahan seperti durian dan rambutan. Warga yang kami cacah juga rata-rata memiliki peliharaan hewan ternak seperti ayam, bebek, dan kambing. Dalam perjalanan menuju *Gampong* Panca Kubu ini, sering kali dijumpai sapi-sapi di pinggir jalan. Sapi tersebut dibebaskan untuk mencari makanan sendiri. Di beberapa titik bisa dijumpai kandang sapi yang berada tepat di pinggir jalan, pada sore hari secara tertib mereka kembali bersama-sama ke kandang. Sebelum menanyakan jumlah kepala keluarga kepada PPL, kami sudah menduga bahwa jumlah KK di sini sangatlah sedikit. Pada saat melakukan jumatatan di masjid, jemaah masjid bagi pria desa tak lebih dari satu saf, dan kurang dari 40 jemaah. Dari dua rumah penduduk yang didatangi, kedua rumah itu memiliki anak kecil di bawah lima tahun. Keluarga di kawasan *gampong* itu sangat kooperatif, dalam beberapa kali kesempatan saya meminta izin untuk memfoto kondisi rumah yang sederhana, tetapi tuan rumah sama sekali tidak keberatan.

Kisah heroik dapat disimak dari tiga perempuan yang berprofesi sebagai guru sekolah dasar di Malingge. Saya berjumpa dengan 4

guru sekolah dasar pada saat menyebrangi kapal. Kebetulan kami duduk di belakang kapal dan cukup lama mengobrol mengenai Pulo Aceh. Tanpa membutuhkan waktu panjang, saya terdeteksi sebagai orang asing dan bukan warga asli. Mungkin dari gaya bahasa dan mimik saya yang tidak terbiasa menyebrangi lautan. Beberapa diantara guru sekolah dasar ini sudah didata oleh Regsosek, sisanya belum. Perjuangan yang cukup berat dilalui oleh satu rombongan guru ini. Berdasarkan penuturan beliau, disampaikan bahwa mereka berempat sedang melakukan tes urine untuk memperpanjang masa sebagai guru kontrak. Setiap kali perpanjangan kontrak ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Terkadang syarat tersebut tidaklah mudah untuk dipenuhi mengingat sarana dan prasarana yang ada di Pulo Aceh sangatlah terbatas.

Sinyal untuk komunikasi saja tidak ada, berbagai akses informasi yang dibutuhkan pun tentu akan sulit didapatkan. Sebuah perjuangan yang tidak mudah karena mereka harus ke Banda Aceh dan harus menginap. Kapal dari Pulo Aceh ke Banda Aceh hanya satu kali pemberangkatan, artinya seseorang tidak bisa pulang pergi dari Pulo ke Banda Aceh. Pada saat dimintai nomor ponsel untuk saya kunjungi ke kediamannya, beliau mengeluarkan nomor yang ada pada kartu perdana. Beliau mengatakan, di sana tidak ada sinyal percuma meminta nomor ponsel. Seketika saya terdiam mendengar beberapa cerita dari seorang guru kontrak di kepulauan.

H. Kisah Lain: Keluarga Subjek Data

Pada bagian ini, kami ingin menyampaikan kisah lain masih seputar kegiatan Regsosek di wilayah Aceh. Kisah ini didapatkan dari Pak Tasdik (Tasdik Ilahmudin), BPS Provinsi Aceh, yang kebetulan sudah melakukan beberapa kunjungan di kabupaten/wilayah lain di luar Kabupaten Aceh Besar dan Pulau Weh, Kota Sabang (Gambar 9.11). Menarik untuk disampaikan, agar rangkaian narasi emik pelaksanaan Regsosek di wilayah (Provinsi) Aceh ini dapat terwakilkan. Salah satu contoh kisahnya adalah perjalanan Regsosek di Cok Langit,

merupakan bagian wilayah dari Desa Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulus-salam .

Wilayah ini ditinggali para pendatang yang mayoritas berasal dari Nias, dengan jumlah kurang lebih 14 keluarga. Perjalanan menuju pemukiman Cok Langit dapat ditempuh kurang lebih 1 jam dari pusat desa. Posisi wilayah yang berada di puncak pegunungan mengharuskan petugas menggunakan motor trail atau mobil *offroad* jika ingin menuju wilayah ini. Namun, karena saat itu musimnya sering turun hujan, menuju wilayah Cok Langit membutuhkan usaha lebih, terlebih harus mendaki jalanan yang berlumpur dan licin.

Ketika Petugas Regsosek melakukan pendataan ke tempat ini, wilayah Cok Langit, ada beberapa hal yang ditemukan. Pertama, warga yang tinggal di sini, kehidupannya sangat sederhana, hanya menggunakan listrik dari tenaga tata surya. Namun demikian, di tempat ini tetap memiliki akses jaringan internet dengan menggunakan android, walaupun hanya sebagian wilayah saja. Kedua, penduduk di Cok Langit ini tidak banyak aset primer yang dimiliki, tetapi kebanyakan mereka memiliki pekerjaan, yaitu di bidang perkebunan dan hortikultura, seperti kelapa sawit, jengkol, karet, dan tanam cabai. Masyarakat di Cok Langit ini, sebagian memiliki kebun sendiri, atau



Sumber: Google Maps

Gambar 9.11 Peta Aceh Besar



Foto: Eko (2022)

Gambar 9.12 Wajah-wajah Penuh Harapan Anak-anak Cok Langit Aceh

menjadi buruh di ladang orang lain. Ketiga, anak-anak yang tinggal di Cok Langit ini sebagian besar tidak bersekolah (Gambar 9.12). Mereka lebih banyak bekerja di ladang, untuk membantu orang tua atau bekerja untuk mendapatkan nafkah (sebagai buruh ladang). Keempat, masyarakat di Cok Langit, tidak banyak yang memiliki kemampuan berbahasa Indonesia. Dalam kaitan Regsosek ini, petugas meminta bantuan kepada salah seorang warga sebagai penerjemah saat melakukan wawancara pencacahan. Kelima, di Cok Langit tidak tersedia pasar atau tempat untuk melakukan jual beli ataupun tukar tambah komoditas maupun barang-barang kebutuhan lain. Jika ingin melakukan kegiatan jual beli, harus keluar dari pemukiman Cok Langit.

Satu hal perlu juga menjadi catatan bahwa pada saat Regsosek ini berlangsung, wilayah di Aceh Tengah mengalami musim hujan yang relatif besar, bahkan beberapa daerah terjadi bencana banjir, seperti di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan beberapa wilayah Aceh lainnya. Kondisi cuaca dan bentang alam Aceh (khususnya wilayah pegunungan) sudah bisa menggambarkan bagaimana usaha yang harus dicurahkan dalam memperoleh data untuk keperluan Regsosek ini.

I. Mengikat Individu dalam Tugas Negara

BPS sebagai lembaga penanggung jawab Regsosek secara strategis dan teknis memiliki beban tugas yang tidak mudah. Sebagai tugas yang krusial, kegiatan survei membutuhkan energi dan tenaga yang besar. Pada konteks hulu, kebijakan strategis, instrumen survei, SDM, anggaran, dan sinergi antar-*stakeholder* sudah disiapkan secara optimal. Berbagai tarikan kepentingan politis dan ego sektoral kementerian/ lembaga negara terjadi pada proses perencanaan Regsosek. Tarik ulur kepentingan ini memiliki dampak mundur dan mepetnya persiapan teknis di lapangan. Proses hulu yang belum sepenuhnya optimal, memiliki dampak pada pelaksanaan di hilir. Petugas teknis di lapangan harus melaksanakan kegiatan pencacahan pada waktu yang relatif mepet, cukup berbeda dengan pola sensus sebelumnya yang memiliki perencanaan dan sosialisasi yang matang. Koseka, PML, dan PML menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan tugas. Pelimpahan tugas dari pusat harus dilaksanakan sebaik mungkin. Perpanjangan negara pada level kecamatan dan desa ini diikat oleh tugas negara yang tidak mudah.

Pada konteks empiris di lapangan, terjalin kerja sama yang padu antara mesin organik dan non organik BPS. Mesin organik BPS merupakan pegawai internal BPS yang memiliki tugas mengkoordinir dan melaksanakan Regsosek, sedangkan petugas non organik adalah petugas eksternal BPS yang berasal dari unsur masyarakat. Petugas non organik pada umumnya bukan orang baru di lingkungan BPS. Rata-rata petugas non organik memiliki kerja sama dengan durasi lebih dari 10 tahun. Pengorganisasian kerja secara cepat dan tepat menjadi ciri khas ala BPS. Tempo sosialisasi yang cepat serta pelaksanaan pencacahan dengan durasi waktu 30 hari menjadi tantangan tersendiri. Waktu pencacahan juga dilakukan pada musim hujan, hal ini sedikit banyak memiliki tantangan tersendiri. PML dan PPL sebagai ujung tombak merupakan mesin penggerak yang paling krusial. Sebagai eksekutor lapangan, PML dan PPL dituntut untuk mencacah tidak hanya cepat tetapi juga harus jeli. Tuntutan dan ikatan tugas negara ini memberikan berbagai pengalaman manis sekaligus pahit. Berbagai

pengalaman dalam mengolah data, finansial dan jaminan kerja menjadi pengalaman manis bagi petugas PPL dan PML. Pada sisi lain, mendapat penolakan dari masyarakat sampai sakit tifus menjadi pengalaman pahit bagi petugas di lapangan. Tugas yang mengikat ini menghasilkan sebuah apresiasi yang sangat luar biasa. Secara umum target BPS mencapai 80-an persen dari 100 persen pencapaian data meskipun ada berbagai ketimpangan nasional antarprovinsi dan antarkabupaten karena persoalan geografis, infrastruktur, dan akses teknologi. Pelaksanaan Regsosek pada tahun 2022 menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi *stakeholder*. Ini adalah kali pertama berbagai kementerian dan lembaga negara berkolaborasi dalam merumuskan konsep, variabel, dan indikator untuk sebuah survei nasional. Meskipun ada berbagai kekurangan dan kelemahan di berbagai sektor, hal ini bukan sinyal untuk menghentikan upaya untuk menghasilkan data bersama. Berbagai monitoring dan evaluasi perlu dilakukan sebagai sebuah tugas bersama yang bukan hanya mengikat individu dan masyarakat, tetapi juga mengikat stakeholder untuk melakukan kolaborasi bersama untuk mencapai kesejahteraan negara dan bangsa.

J. Penutup

Pelaksanaan Regsosek dilakukan selama satu bulan, sedangkan waktu peneliti di lapangan hanya kurang dari tujuh hari. Artinya, lebih banyak yang peneliti tidak ketahui dibandingkan apa yang sudah diketahui. Meskipun selama di lapangan peneliti berusaha semaksimal mungkin mengambil data dari suara, pandangan dan bahkan dari *hati*. Bak seorang perempuan, begitu juga mengenai riset (etnografi?), yakni bukan apa yang dia katakan, tetapi lebih pada hal yang tak terucap. Untuk memahami bagaimana data di produksi, peneliti dituntut lebih berempati, peka, dan memahami (*verstehen*). Untuk memahami pelaksanaan Regsosek ini, diperlukan sebuah seni, khususnya seni untuk memahami.

Perencanaan/kegiatan sejenis ini sering kali hanya dimiliki oleh kalangan tertentu. Masyarakat umum kurang mengetahui data ini untuk apa dan untuk siapa. Hal ini menjadi momentum bagi kita untuk merefleksikan langkah yang sudah dilewati dan rencana yang akan datang. Tugas kita semua selanjutnya adalah bahwa bagaimana sebuah program kegiatan itu dimiliki semua anak bangsa (*sense of belonging*) oleh petugas lapang dan rakyat (penduduk). Dengan adanya rasa memiliki, akan didapatkan dampak yang lebih produktif, dengan berasaskan keadilan dan kesejahteraan inklusif. Hal yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana agar masyarakat merasa memiliki program-program dari pemerintah? Merasa memiliki data dan yang lebih penting adalah memiliki kesejahteraan itu sendiri. Kenyataan ini tentu menjadi tugas dan tanggung jawab bersama.

Penelitian ini memberikan 2 rekomendasi secara teknis. Pertama, pentingnya sebuah peta *mapping* kawasan sebagai *output* pendataan. Peta visual sangat dibutuhkan untuk mengetahui kawasan mana yang menjadi prioritas pembangunan. Kedua, secara teknis sosialisasi mengenai Regsosek perlu dilakukan dengan durasi waktu yang lebih panjang agar masyarakat mengetahui maksud dan waktu pencacahan. Pada konteks desa di Indonesia, sosialisasi dengan melibatkan kepala dusun dan kepala rukun tetangga (RT) menjadi efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

- BPS Provinsi Aceh. (2021). *Jumlah penduduk miskin (Ribuan jiwa) 2021*. <https://aceh.bps.go.id/indicator/23/34/1/jumlah-penduduk-miskin.html>
- BPS. (2022). *Satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat*. Diakses pada 18 November, 2022, dari <https://www.bps.go.id/Regsosek/>
- Feeney, G., & Feeney, S. (2019). On the logical structure of census and survey questionnaires. *Genus*, 75(1), 19. doi:10.1186/s41118-019-0065-y

Google. (t.t). [Lokasi Kabupaten Aceh Besar]. Diakses pada 20 November, 2022, dari <https://www.google.com/maps/place/Aceh>

Kirkwood, M. K., Hanley, A., Bruinooge, S. S., Garrett-Mayer, E., Levit, L. A., Schenkel, C., Seid, J. E., Polite, B. N., & Schilsky, R. L. (2018). The state of oncology practice in America, 2018: Results of the ASCO practice census survey. *Journal of Oncology Practice*, 14(7), 412–420. doi.org/10.1200/JOP.18.00149